

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Didalam era globalisasi sekarang ini seiring perkembangan jaman yang kian cepat seluruh struktur masyarakat baik masyarakat biasa maupun pemerintah harus lebih cermat dalam mengembangkan sistem perekonomian dalam segala bidang. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam memaksa setiap individu untuk terus berfikir cepat dan tanggap dalam menggali setiap sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu tersebut. Dalam hal ini setiap individu dapat memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh alam yang disebut sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Sumber daya alam memang sebuah kekayaan alam tersendiri yang dimiliki oleh sebuah daerah tertentu. Apabila pengelolaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan baik maka dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam skala besar pengelolaan sumber daya alam biasanya dikelola oleh pemerintah dan bekerjasama dengan pihak swasta yang menciptakan hubungan kemitraan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta selaku pengelola pihak sumber daya alam. Akan tetapi pada kenyataannya sering kali hubungan kemitraan yang terjadi antara pemerintah dan pihak swasta selaku pengelola sumber daya alam. Dengan demikian justru hubungan kemitraan yang terjadi antara pemerintah dan swasta menimbulkan konflik-konflik sosial yang mengorbankan masyarakat

sekitar lokasi sumber daya alam yang secara langsung terkena dampak akibat adanya eksploitasi. Hal ini belum termasuk ada atau tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan eksploitasi. Seringkali masyarakat sekitar lokasi sumber daya alam tersebut kurang atau bahkan tidak dilibatkan dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga masyarakat sekitar hanya menerima dampak negative dari kegiatan eksploitasi tanpa ikut menikmati hasil kekayaan alam yang terdapat di sekitar tempat tinggal mereka.

Negara Indonesia mengenal Otonomi Daerah (OTODA) sebagai sistem pemerintahan terutama mengenai distribusi kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), dengan kata lain sistem ini memungkinkan sebuah daerah memiliki kewenangan tersendiri untuk menentukan kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah dapat lebih tanggap terhadap tuntutan masyarakat daerah selain untuk meningkatkan kinerja dan potensi dasar yang dimiliki oleh suatu daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat dengan sah memutuskan untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat sehingga dapat lebih memaksimalkan distribusi perekonomian kepada masyarakat secara merata. Pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang selain harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga harus sesuai dengan kondisi dan potensi ruang yang ada. Terbitnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Provinsi Jatim No. 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur, menjadikan beberapa muatan dalam

RTRW Kabupaten Ponorogo memerlukan beberapa penyesuaian. Secara Fisiografi Bagian Timur Kabupaten Ponorogo dengan ketinggian lebih dari 1000 m dibawah permukaan laut, merupakan pegunungan yang relatif subur bagian dari Gunung Wilis sebelah barat, kawasan ini sebagian besar wilayahnya direncanakan sebagai bagian dari kawasan lindung dan kawasan penyangga. Bagian barat, hamper 40% berupa perbukitan kapur yang relatif tandus sebagai bagian dari pegunungan selatan Jawa Timur dan bagian tengah berupa dataran yang subur karena dilalui oleh Sungai Keyang dan percabangannya dengan ketinggian 100-500 m dibawah permukaan laut.

Kabupaten Ponorogo mempunyai Potensi SDA maupun SDM yang siap dikembangkan sebagai kawasan yang produktif, baik dari segi pertambangan (seperti kapur, emas, zeng, hingga panas bumi), sektor pertanian (perkebunan dan holtikultura) dan sektor pariwisata (budaya dan alam) dengan kata lain sebagai kawasan multi prospektif. Perkembangannya menunjukkan adanya pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pngembangan kegiatan pertanian, pertambangan serta kegiatan pariwisata belum optimal. Hal ini dikarenakan terbatasnya sarana prasarana yang akan mendukung perkembangan kegiatan tersebut. Menyadari kondisi ini, maka pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ponorogo haruslah berusaha dan berbenah diri untuk menjadi sasaran perkembangan dalam skala besar termasuk melakukan berbagai terobosan menarik minat investasi di berbagai bidang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menata ruang wilayah Kabupaten Ponorogo dengan prinsip menarik dan berkelanjutan.

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah Provinsi di Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun sebelah utara, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek di sebelah timur, Kabupaten Pacitan sebelah barat daya, serta Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) sebelah barat. Ponorogo memiliki luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup>. Ibukotanya adalah Ponorogo. Kabupaten Ponorogo terdiri dari atas 21 Kecamatan, yang terdiri atas 303 desa dan Kelurahan. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Ponorogo terdapat Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Pertambangan (PDP) Sari Gunung Kabupaten Ponorogo merupakan badan usaha daerah yang bergerak dalam bidang pertambangan khususnya pengelolaan pertambangan batu kapur yang berada di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Setiap perusahaan dituntut untuk melakukan perubahan kearah kemajuan perusahaan yang sejalan dengan arah perkembangan jaman. Pada dasarnya Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” Kabupaten Ponorogo adalah perusahaan satu-satunya yang memonopoli produk batu gamping akan tetapi perlu diwaspadai bahwa suatu saat akan muncul perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang batu gamping, sehingga dalam menghadapi persaingan-persaingan usaha tersebut perlu diadakan persiapan yang matang agar pengelolaan pertambangan batu kapur lebih berkembang. Perlu digaris bawahi bahwa dengan adanya situasi yang sangat krusial dalam beberapa tahun kedepan maka Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” Kabupaten Ponorogo harus bertindak dengan cepat dan tepat serta menuju kearah yang lebih jelas dalam menghadapi suatu tantangan.

Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung Kabupaten Ponorogo merupakan perusahaan yang didirikan untuk dapat memberi harapan dan kebutuhan masyarakat yang bergerak dalam bidang industri batu kapur. Oleh karena itu Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu alternatif dalam menyediakan bahan baku mentah berupa batu kapur yang berkualitas nomor satu dibanding dengan bahan baku di daerah lain. Pengelolaan pertambangan oleh masyarakat dibawah pengawasan PDP. Sari Gunung sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

Kecamatan Sampung sendiri terletak di Ponorogo bagian barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo, perolehan atau hasil pertambangan digunakan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi dengan adanya pertambangan yang terletak dengan kawasan pemukiman penduduk ini tentunya menimbulkan masalah lain bagi penduduk sekitar lokasi penambangan seperti tailing (limbah pembuangan dari proses penambangan), rusaknya akses jalan di Kecamatan Sampung khususnya jalan menuju kawasan pertambangan. Disamping hal ini Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung juga melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengelolaan pertambangan batu kapur. Dengan demikian nampaknya ada praktik kekuasaan persuasif yang diperankan oleh para aktor pemegang kekuasaan di Kabupaten Ponorogo sehingga dapat

meredam semua masalah-masalah yang timbul akibat adanya pertambangan tersebut.

Berdasarkan permasalahan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo akhirnya memilih judul skripsi yaitu *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANANCE*” (Studi Tentang Pengelolaan Tambang Batu Kapur di Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung Kecamatan Sampung Kabupaten Poorogo)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Pengelolaan Pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah?
2. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dalam mewujudkan Good Governance?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah
2. Untuk mengetahui usaha- usaha yang dilakukan dalam mewujudkan Good Governance

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan adalah:

1. Bagi Pemerintah Sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan pertambangan batu kapur di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo di masa yang akan datang.
2. Dapat digunakan sebagai informasi tentang keberadaan pertambangan dan proses pengelolaannya hingga dampak positif maupun negatif dari kegiatan Pertambangan khususnya bagi masyarakat sekitar daerah Pertambangan.
3. Bagi Penulis, selain sebagai bahan laporan hasil penelitian. Juga berguna untuk mengetahui Implementasi Kebijakan UU No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambngan dalam mewujudkan Good Governance di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

#### **3.2 Penegasan Istilah**

Definisi dari beberapa istilah penting dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Implementasi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia merumuskan implementasi sebagai Sekumpulan aktivitas dengan mengikuti peraturan yang bermaksud untuk tujuan program dan ingin mendapatkan hasil dari birokrasi (pegawai pemerintahan). Implementasi meliputi aksi dan reaksi oleh peranan yang bermacam-macam terutama kantor pungen. Rencana untuk program kedalam dipengaruhi dengan ketidak sungguhan seperti cara untuk mencapai tujuan).

Dari pemahaman diatas, maka dapat dirumuskan Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas untuk menyampaikan kebijaksanaan kepada masyarakat supaya kebijakan tersebut dapat diterima masyarakat seperti sebagaimana yang diharapkan. Supaya implementasi dapat berjalan maka perlu diperhatikan isi kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan yaitu :

1. Secara langsung mengimplementasikan program-program
2. Melalui formulasi kebijakan derivat/turunan dari kebijakan publik tersebut.

### **2. Kebijakan**



Kebijakan menurut Kamus besar bahasa Indonesia Implementasi adalah Rangkaian konsep dari asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kepemimpinan .

## **2. Pertambangan**

Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 1967 **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan batu kapur yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan , konstruksi, pengolahan dan penjualan serta pasca tambang.

## **4. Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung**

Adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Ponorogo yang bergerak di bidang pertambangan batu kapur atau batu gamping di Desa Sampung , Kecamatan Sampung , Kabupaten Ponorogo.

## **5. Good Governance**

Menurut Agus Dwiyanto (2008) Good Governance dalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance” (pemerintahan yang baik).

### **5.2 Landasan Teori**

Teori dalam penelitian sangat penting artinya, teori dapat dipakai dan dijadikan pedoman berfikir guna menjelaskan dan menanggapi gejala-gejala yang mungkin akan timbul dalam penelitian. Pengertian teori menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah Pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Sedangkan menurut Koentjoningrat adalah sebagai berikut “ Teori merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan”. Tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, maka tidak akan ada ilmu pengetahuan.

Dalam Landasan teori atau kajian pustaka ini akan dikupas mengenai:

1. *Good Governance dalam Pelayanan Publik*

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan Administrasi Negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* ( Pemerintahan atau

Kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*good governance*” (Kepemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut “Alignment” (Koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berjalan langsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintahan dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

## 2. Konsep Good Governance

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah

sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi, pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Dari segi fungsional, aspek : *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintah tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi.

### **5.3 Definisi Operasional**

Yang dimaksud dengan definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel

Dengan kata lain merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya.

Maka dioperasionalkan dalam penelitian ini, juga harus ditetapkan indikator sebagai berikut:

#### 1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan

- Dalam Pengelolaan pertambangan dijelaskan bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan endapan-endapan alam sebagai Karunia Tuhan yang Maha Esa adalah Kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
- Pengelolaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan suatu daerah.
- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan batu kapur yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan dan penjualan serta pasca tambang.

#### 2. Good Governance

- **Transparansi**, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Masyarakat perlu mengetahui seberapa besar pemerintah memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta Masyarakat juga dapat mengetahui apakah pemerintah membelanjakan uangnya untuk kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan pejabatnya.
- **Partisipatif**, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Membantu dan menyiapkan segala kebutuhan masyarakat maupun penambang.
- **Kondisional**, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam memberi pelayanan sesuai dengan kondisi.
- **Akuntabilitas**, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melayani berdasarkan aturan yang berlaku.
- **Kesamaan hak**, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. Dalam melayani tidak membedakan semua diperlakukan sama dan adil.

- ***Keseimbangan hak dan kewajiban***, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Dalam memberi pelayanan mempertimbangkan antara yang dilayani dan yang melayani.

## **1.8 Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau memberikan informasi secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ada.

### **1. Metode Penentuan Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan sebuah penelitian di Kecamatan Sampung yaitu di Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung yang bergerak dalam bidang penambangan batu kapur dan hasil penambangan tersebut digunakan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Alasan Penulis memilih tempat karena di Kecamatan Sampung terdapat sebuah Potensi Sumber Daya Alam berupa batu kapur milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat dibawah Pengawasan Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung Kecamatan Sampung.

### **2. Metode Penentuan Informan**

Informan adalah orang yang memberikan informasi, fakta-fakta mengenai suatu hal, atau orang yang diwawancarai dan dimintai informasi oleh peneliti. Dalam penelitian ini jenis informasi yang diperlukan yaitu

Dalam pengambilan Informan penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik informan yang sudah diketahui sebelumnya atau dianggap tahu masalah secara mendalam tentang Implementasi Kebijakan Pertambangan. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki dan mengetahui berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan ini berjumlah 8 orang terdiri dari Direktur PD. Pertambangan Sari Gunung 1 orang, Staf Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung 1 orang, Pengusaha atau masyarakat umum 2 orang, Penambang batu kapur atau pekerja pemerintah 2 orang dan masyarakat sekitar areal tambang 2 orang.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan penelitian, artinya ‘tanpa data tidak akan nada



penelitian' dan data dipergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang harus benar. Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (*primer*) yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada informan atau melakukan wawancara dengan masyarakat (pelaku penambangan dan masyarakat yang tinggal di daerah penambangan dan Pemerintah. Sedangkan tidak langsung (*sekunder*) yaitu Data yang diperoleh berupa dokumentasi, arsip-arsip dan data dari sumber tertulis lainnya pada dinas yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Dan pelaksanaan pembahasan suatu penelitian secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh penulis.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan interview atau wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pernyataan lisan kepada subjek penelitian, biasanya dilakukan melalui tatap muka secara langsung.

Oleh karena itu dalam melaksanakan wawancara perlu diciptakan hubungan yang baik antara penulis dan informan agar diperoleh data atau informasi yang akurat.

Langkah operasional dari metode ini adalah penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijawab informan, dengan menemui informan untuk memperoleh jawaban secara langsung dari informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau analisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran dan identifikasi untuk melengkapi dan memperjelas data dari hasil wawancara. Dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai isi dan substansi dari permasalahan yang ada.

#### **4. Metode Analisa Data**

Dalam Menganalisa data yang digunakan Penulis adalah menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian terhadap suatu obyek pada masa sekarang dan penuturan, menganalisis, dan mengklarifikasikan data yang diperoleh untuk intrepretasi secara tepat.

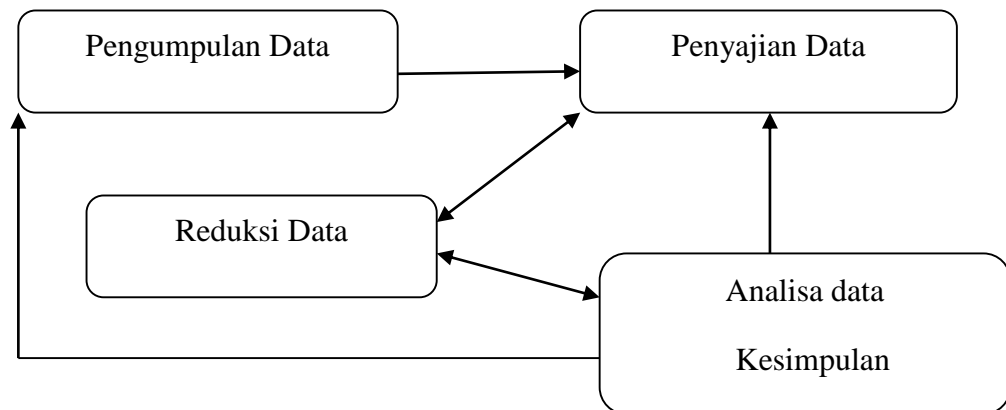
Alasan Peneliti menggunakan Metode Deskriptif

1. Pemaparan dalam metode deskriptif memungkinkan penulis dapat menemukan dan memecahkan permasalahan

2. Pemaparan metode deskriptif dapat menjadikan pedoman bagi penulis untuk menafsirkan data
3. Pelaksanaan metode tidak terbatas pada pengumpulan data sehingga memungkinkan penulis untuk menganalisis dan menginterpretasi data, begitu seluruh data yang diperoleh telah selesai dikumpulkan semuanya dianalisis lebih lanjut secara intensif. Menurut Milles dan Hiberman (1992) Langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut :

### BAGAN I

#### BAGAN ANALISA DATA



**Sumber : Menurut Milles dan Huberman**

**Keterangan :**

#### **1. Penyusunan Data**

Kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data sebelum melakukan analisa data perlu dilihat alat ukur pengumpulan data antara lain Dokumentasi dan wawancara atau gabungan keduanya.

## **2. Penyajian Data**

Peneliti menggambarkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah bentuk teks cerita atau naratif.

## **3. Reduksi Data**

Dalam tahap ini penulis melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan , abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.

## **4. Kesimpulan**

Peneliti dapat menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan memberi makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.